

## Buya Syafi'i Mengaku Difitnah

JAKARTA — Ahmad Syafi'i Ma'arif, pendiri Maarif Institute dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, membantah berita bahwa dirinya menerima sebuah apartemen mewah dari Aburizal Bakrie. Ia bahkan berencana mengadakan majalah *Suara Islam*, yang melansir berita itu, ke Dewan Pers.

"Berita itu fitnah dan tidak jelas asal-usul sumbernya," kata pengacaranya, Todung Mulya Lubis, dalam keterangan pers di kantornya, gedung Mayapada, Jakarta, kemarin. Menurut dia, berita itu tak pernah dikonfirmasi kepada Buya Syafi'i—panggilan Syafi'i. Pemberitaan itu ia nilai sebagai bentuk pencemaran nama baik kliennya sebagai guru bangsa dan pejuang kemajemukan.

Itu sebabnya, masalah ini akan diadakan ke Dewan Pers dalam satu dua hari ke depan. Todung juga akan meminta majalah *Suara Islam* mencabut berita itu dan meminta maaf kepada kliennya secara terbuka. Jika permintaan ini tak dipenuhi, masalah tersebut akan diselesaikan lewat jalur hukum.

Majalah *Suara Islam* dalam tulisan berjudul "Multi Accident Award" edisi 19 November-3 Desember 2010 menyebutkan, Syafi'i diberi apartemen mewah seharga Rp 2 miliar untuk membungkamnya agar tak kritis soal lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Artikel ini ditulis oleh Jaka Setiawan.

Syafi'i menyatakan tak pernah menerima apartemen itu. "Masak, harga saya hanya Rp 2 miliar?" katanya. Menurut dia, wartawan majalah ini, Abdul Halim, mengirim pesan pendek pada 24 September 2010 yang menanyakan apakah dia menerima apartemen mewah padahal sembilan tokoh lainnya menolak. Ia meminta asistennya, Asyukhairi, membalas. "Saya malas menanggapi," tuturnya.

Sehari sesudahnya, Abdul Halim kembali mengirim pesan singkat yang akan mencabut berita tapi meminta waktu untuk wawancara. "Karena dia akan mencabut berita, buat apa saya tanggap?" Pada Senin lalu, Abdul Halim mengirim sandek lagi: "Hehehe. Akhirnya marah juga."

Juru bicara pengusaha yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, membantah berita *Suara Islam* itu. "Ini zaman fitnah," ujarnya kemarin. Apartemen Taman Rasuna di kawasan Kuningan itu milik si empunya apartemen masing-masing. ● FEBRIYAN | MAHARDIKA SATRIA HADI



Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo (berkemeja batik) di kediamannya, Yogyakarta, kemarin.

## Pangeran Yogya Tinggalkan Demokrat

Tak diundang dalam pertemuan di Cikeas.

YOGYAKARTA — Adik Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabu Kusumo, memutuskan mundur dari kepengurusan dan keanggotaannya di Partai Demokrat. Keputusan ini merupakan buntut kontroversi tentang pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Malam nanti Prabukusumo menyatakan resmi mundur," kata orang dekat Pangeran Prabu kepada *Tempo* kemarin. Sebelumnya, setelah menemui para seniman di kediamannya, Alun-alun Kidul, Yogyakarta, Pangeran Prabu menyatakan, "Kemungkinan mundur, tunggu nanti malam saja."

*Tempo* pun menanyakan pendapatnya tentang harapan Ketua Dewan Pembina Demokrat yang juga presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, agar Pangeran Prabu, yang juga Ketua Demokrat Provinsi Yog-

yakarta, tak mundur dari partai. Presiden menyampaikan hal itu kepada sejumlah pengurus Demokrat Yogyakarta di Puri Cikeas, Sabtu pekan lalu. "Tidak bisa," ucapnya tegas. "Ini soal harga diri bapak saya (Sri Sultan Hamengku Buwono IX). Saya tak ingin menjadi anak durhaka."

Di hadapan para seniman tradisional, Pangeran Prabu menangis ketika menyampaikan alasan pembelaannya terhadap martabat ayahnya. Para seniman yang mendesak Demokrat agar mendukung penetapan, ikut menangis.

Ia menjelaskan, ayahnya dan Paku Alam VIII telah mengorbankan harga diri dengan mengumumkan Amanat 5 September 1945, yang menyerahkan negara Ngayogyakarta Hadiningrat yang berdaulat kepada Indonesia. "Harga diri bapak, yang tadinya berkuasa penuh, menjadi sangat sangat terbatas. Kalau sekarang masih diucik-ucik, itu keterlaluan," kata Pangeran Prabu.

Rencana mundur sudah disampaikan beberapa hari lalu jika pemerintah berkeras mengusulkan pemilihan Gubernur Yogyakarta dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Selama ini Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam otomatis ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pemerintah tetap menginginkan ada pemilihan. Sikap Demokrat pun sama, yakni mendukung pemilihan.

Menurut Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Andi Alifian Mallarangeng, sikap itu disampaikan dalam pertemuan Yudhoyono dan pengurus pusat dengan pengurus kabupaten/kota dan provinsi se-Yogyakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga ini pun mempersilakan jika Pangeran hendak mengundurkan diri.

Pangeran Prabu mengaku tak diundang dalam pertemuan itu. "Demi Allah." Padahal, telepon rumah dan telepon selulernya selalu aktif.

● BERNADA RURIT | MAHARDIKA SATRIA HADI | JOBPIE S.

## Jabatan Gubernur Utama Dikritik

JAKARTA — Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin khawatir Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta versi pemerintah memunculkan dualisme kepemimpinan di provinsi itu. Kalau itu terjadi, aturan tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Irman, istilah gubernur utama dan gubernur bakal membungkung masyarakat Yogyakarta. Apalagi, jika kewenangan keduanya tak bisa dibedakan secara tegas dan jelas, akan terjadi dualisme pemerintahan. Ia mencontohkan, gubernur bertanggung jawab secara vertikal kepada presiden. Sedangkan secara horizontal, ia bertanggung jawab kepada gubernur utama.

"Kerancuan semacam ini inkonstitusional dan akan bermasalah di kemudian hari," katanya ketika dihubungi kemarin.

Kementerian Dalam Negeri pada Senin lalu telah merampungkan rancangan itu. Isinya, antara lain, Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam dinobatkan menjadi orang nomor satu dan dua di Yogyakarta (gubernur utama dan wakil gubernur utama). Sedangkan kepala daerah yang dipilih disebut gubernur.

Sultan bersama Paku Alam memperoleh hak-hak protokol, kewenangan merumuskan anggaran daerah, memelihara nilai-nilai sosial-budaya, menentukan peraturan daerah istimewa, dan berkonsultasi dengan para calon gubernur. Jika keduanya menolak rancangan peraturan daerah, rancangan harus dikembalikan kepada DPRD. Namun mereka tak memiliki hak impunitas dan wewenang memberhentikan gubernur.

Gagasan itu juga dikritik oleh Wakil Ketua Komisi II (pemerintahan) DPR Ganjar Pranowo. "Saya bingung," kata politikus PDI Perjuangan ini. Tapi, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas memperkirakan ada kompromi untuk menuntaskan polemik ini. Jalan tengahnya, Yogyakarta tetap memiliki keistimewaan tersendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. ● MAHARDIKA SATRIA HADI | MUH SYAIFULLAH | AMIRULLAH | ANTARA

## Golkar Yakin Interpelasi Pembubaran Satgas Gol

JAKARTA — Fraksi Partai Golkar terus menggeliat untuk membubarkan Satuan Tugas Anti-Mafia Hukum melalui hak interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Bambang Soesatyo, anggota fraksi ini, menyatakan yakin usulnya akan didukung oleh para anggota Dewan lainnya.

"Sudah digulirkan. Kami hanya butuh dukungan minimal 25 tanda tangan anggota dari setidaknya dua fraksi," kata Bambang lewat pesan pendek kepada *Tempo* kemarin. Ia bahkan menyebutkan beberapa ang-

gota fraksi lain ikut yang mendukung. "Yang sudah *confirm* mendukung, saya dan beberapa dari Golkar, PPP, PDIP, PKS, Hanura, dan Gerindra."

Namun Bambang merahasiakan nama-nama mereka. Ia juga berharap anggota dari Fraksi PAN ikut bergabung.

Anggota Komisi III (Bidang Hukum) dari PKS, Aboebakar al-Habsyi, mengaku sangat setuju dengan penggunaan hak interpelasi pembubaran Satgas. "Satgas enggak perlu," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, ke-

marin. Menurut dia, Satgas, yang dibentuk dengan keputusan presiden, telah mengecilkan peran lembaga-lembaga hukum semacam kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kapan kita bisa menghargai lembaga-lembaga sendiri?"

Anggota Komisi Hukum dari Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani, juga berpendapat eksistensi Satgas perlu dikaji ulang. "Tak bisa seenaknya datang ke sini ke situ melakukan investigasi," katanya. Menurut Yani, sah saja Presiden memben-

tuk Satgas untuk mendapatkan *second opinion* tentang suatu kasus hukum. Namun jangan sampai memasuki wilayah pro yustisia. "Satgas alat bantu Presiden, bukan LSM."

Yani tak setuju jika Satgas serta-merta dibubarkan tanpa lebih dulu dievaluasi dan diaudit kinerjanya. "Jangan-jangan Satgas sudah mendapat duit pajak," ujarnya.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menganggap upaya Golkar itu cuma main-main. ● AMIRULLAH